

## **ABSTRAK**

**Fanny Sopania Alwasyi (2019): “Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) Tahun 2017”**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata hukum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui dan mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap layanan pembebasan biaya perkara yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang layanan pembebasan biaya perkara, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta (Studi pada Layanan Pembebasan Biaya Perkara) tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercantum, tetapi dalam pelaksanaanya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang *double job*, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pelayanan.

## ***ABSTRACT***

**Fanny Sopania Alwasyi (2019): “*Implementation Policy of Republic of Indonesia Mahkamah Agung Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Communities Not Able in Pengadilan Agama Purwakarta Courts (Study on Case Fee Exemption Services) 2017*”**

*Indonesia is a legal state that recognizes and protects human rights in every person, both individuals and groups without discriminating against race, religion, ethnicity, economy, so that all people have the right to receive the same service in the eyes of the law. The purpose of this research was to know and know about implementation the case fee waiver service policy and the obstacles and efforts to overcome the obstacles that occur in the implementation of the case fee waiver service policy in the Pengadilan Agama Purwakarta.*

*This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Data is taken from two sources, namely primary sources and secondary data sources. The method of collecting data uses observations on case fee exemption services that are used as preliminary data, interviews with competent parties in the field of case fee waiver services, and documentation studies are data obtained through libraries related to the implementation of case fee waiver service policies and then the data are analyzed qualitative.*

*Based on the results of the study, Implementation Policy of Republic of Indonesia Mahkamah Agung Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Communities Not Able in Pengadilan Agama Purwakarta Courts (Study on Case Fee Exemption Services) 2017 is accordance with the rules of the Supreme Court, but its implementation here is an obstacle factor that lies in the internet-based information delivery system that is not appropriate for poor people, staff resources that are double jobs, budget and limited quota fee exemption services that lead to uneven services among the poor.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Service.*